

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan mangrove memiliki peranan penting dalam melindungi wilayah pesisir dari gelombang besar, angin kencang, dan badai. Mangrove juga dapat melindungi pantai dari abrasi, menahan lumpur, mencegah intrusi air laut dan juga memerangkap sedimen. Menurut Kusmana,dkk. (2003) fungsi fisik keberadaan hutan mangrove adalah menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi/ abrasi agar tetap stabil, mengendalikan intrusi air laut, melindungi daerah di belakang hutan mangrove dari hempasan gelombang dan angin kencang serta melindungi kehidupan organisme makro dan mikro yang ada di dalamnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan mangrove terbesar dan memiliki kekayaan hayati yang paling banyak. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,2 juta hektare. Ekosistem hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis yang tertinggi di dunia, seluruhnya tercatat 89 jenis. Beberapa jenis pohon yang banyak dijumpai di wilayah pesisir Indonesia adalah bakau (*Rhizophora sp*), api-api (*Avicennia sp*), pedada (*Sonneratia sp*), tanjang (*Bruguiera sp*), nyirih (*Xylocarpus sp*), tenger (*Ceriops sp*) dan, buta-buta (*Exoecaria sp*).

Berdasarkan hasil evaluasi Balai Pengelola Hutan Mangrove Departemen Kehutanan, sedikitnya 50 persen lahan hutan mangrove di seluruh Indonesia berada dalam kondisi rusak. Adapun kerusakan ini salah satunya dipercepat oleh program alih fungsi lahan mangrove sehingga luas areal hutan mangrove semakin

menyempit dari yang sebelumnya 9,3 juta hektar menjadi 6,6 juta hektar. Sedangkan dari 6,6 juta hektar luas hutan mangrove yang ada saat ini, hanya 4,5 juta hektar yang ditumbuhi mangrove.

Hal ini karena di Indonesia, nilai pemanfaatan hutan mangrove masih bernilai rendah karena masih sebatas eksploitatif. Selain itu, minimnya perhatian terhadap pelestarian kawasan hutan itu dari berbagai pihak menjadikan pembukaan lahan hutan semakin menjadi-jadi dalam skala besar dan waktu yang cepat.

Menurut Arief (2003) kerusakan-kerusakan kawasan mangrove dapat dilihat dari 1) perubahan sifat-sifat fisika dan kimia, meliputi suhu air, nutrisi, salinitas, hidrologi, sedimentasi, kekeruhan, substansi beracun, dan erosi tanah 2) perubahan sifat-sifat biologis, meliputi terjadinya perubahan spesies dominan, densitas, populasi, serta struktur tumbuhan dan binatang 3) perubahan keseimbangan ekologi, meliputi regenerasi, pertumbuhan, habitat dan rantai makanan, baik pada ekosistem mangrove itu sendiri maupun pada daerah pantai yang bersebelahan.

Secara umum kawasan mangrove dikabupaten Langkat berada di wilayah pesisir. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (interface) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik dari berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya (Putra, 2001). Secara normatif, kekayaan sumber daya pesisir tersebut dikuasai oleh negara

untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945), serta memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumber daya pesisir, sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor : 23 Tahun 1997.

Kawasan mangrove di wilayah Kabupaten Langkat berada di tujuh wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Pangkalan Susu, Besitang, Brandan Barat, Sei Lapan, Gebang, Tanjung Pura dan Secanggang. Dari keseluruhan kawasan mangrove seluas 43.014 hektar yang berada di wilayah Kabupaten Langkat, maka kondisi kawasan mangrove tersebut saat ini, seluas 2.711,28 hektar (6,4%) termasuk dalam kategori Tidak Rusak, atau dengan kata lain masih dalam kondisi baik. Sebagian lagi dari kawasan mangrove tersebut telah mengalami kerusakan dengan tingkatan yang berbeda. Wilayah seluas 17.915,85 hektar (41,6%) termasuk dalam kategori Rusak dan seluas 22.387,57 hektar (52%) berada dalam kondisi Rusak Berat (Anonimus, 2006).

Ekosistem Mangrove adalah ekosistem alami, dan sangat memegang peranan penting bagi lingkungan terutama di wilayah pesisir yang vital. Konversi ke pemanfaatan lain seperti untuk konversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Konversi hutan mangrove di Kecamatan Brandan Barat terjadi sejak tahun 2006. Sekitar 1.700 Ha hutan mangrove kini rusak akibat dijadikan perkebunan kelapa sawit terutama yang berada di Desa Lubuk Kertang dan Desa Lubuk Kasih.

Perluasan kebun kelapa sawit yang dilakukan dengan mengkonversi hutan mangrove, selain merusak habitat hutan mangrove yang berarti menghancurkan seluruh kekayaan hayati hutan yang tidak ternilai harga dan manfaatnya, juga

akan merubah *landscape* hutan mangrove secara total di Kecamatan Brandan Barat. Kerusakan itu diperparah pula, dengan membuat benteng-benteng penahan air untuk perkebunan kelapa sawit dan penutupan paluh atau anak sungai yang ada di sekitar sungai agar air asin tidak memasuki kebun kelapa sawit dan merusak sawit.

Kegiatan konversi hutan mangrove menjadi kebun kelapa sawit mengakibatkan degradasi kawasan hutan mangrove yang ditunjukkan secara nyata dengan semakin berkurangnya luasan hutan mangrove, banjir akibat tidak adanya lagi penahan air laut saat pasang. serta mengancam manusia karena manfaat hutan mangrove ini tidak hanya bagi biota laut seperti ikan, udang dan kepiting, tapi juga bagi nelayan yang mata pencaharian utama mereka menangkap ikan, udang dan kepiting itu. Ini artinya bila tanaman mangrove yang tumbuh di laut, maka tangkapan nelayan tidak ada lagi, akibat alih fungsi lahan itu.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan dampak konversi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit terhadap kondisi fisik dan non fisik lingkungan di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah adanya konversi lahan, kondisi kerusakan fisik lingkungan hutan mangrove yang mengalami konversi, dampak konversi hutan mangrove terhadap kondisi non fisik (sosial ekonomi) masyarakat dan Upaya pelestarian ekosistem mangrove yang belum dikonversi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada dampak kondisi fisik lingkungan akibat konversi dan dampak kondisi non fisik (social ekonomi) masyarakat di Kecamatan Brandan Barat.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak konversi hutan mangrove menjadi perkebun kelapa sawit terhadap kondisi fisik lingkungan di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana dampak konversi hutan mangrove menjadi perkebun kelapa sawit terhadap kondisi non fisik (sosial ekonomi) masyarakat di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak konversi hutan mangrove menjadi perkebun kelapa sawit terhadap kondisi fisik lingkungan di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui dampak konversi hutan mangrove menjadi perkebun kelapa sawit terhadap kondisi non fisik (sosial ekonomi) masyarakat di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, untuk memenuhi persyaratan akademik pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial serta menambah pengetahuan.
2. Bagi masyarakat, untuk memberi informasi mengenai dampak konversi hutan magrove menjadi kebun kelapa sawit terhadap lingkungan.
3. Bagi pemerintah daerah, untuk memberikan masukan mengenai dampak akibat konversi serta upaya pelestarian lingkungan khususnya Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat.

